

SALINAN



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN DAN
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan penambahan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana ahli utama, perlu menyesuaikan kelas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sehingga perlu diubah;
- b. bahwa perubahan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/726/M.SM.04.00/2020 tanggal 30 Juli 2020 Perihal

Persetujuan Evaluasi Jabatan bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama, dan Surat Nomor B/883/M.SM.04.00/2020 tanggal 3 September 2020 Perihal Persetujuan Penetapan Usulan Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 3. Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386);

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1543);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1543) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai dasar pembayaran kinerja bagi Pegawai.
 - (2) Pejabat administrator dan pengawas yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional, Kelas Jabatan disesuaikan dengan Jabatan administrator dan pengawas sebelumnya sesuai Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sampai dengan adanya penyesuaian penyetaraan penghasilan bagi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1543), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 November 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1717

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Eka Sulistia Ediningsih, S.H.
Nip. 19651012 198601 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN
PIMPINAN TINGGI UTAMA, PIMPINAN TINGGI MADYA, PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Kepala	17
2.	Sekretaris Utama	16
3.	Inspektur Utama	16
4.	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	16
5.	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	16
6.	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	16
7.	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	16
8.	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	16
9.	Kepala Biro Perencanaan	14
10.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	14
11.	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN	14

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
12.	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	14
13.	Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	14
14.	Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	14
15.	Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk	14
16.	Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan	14
17.	Direktur Analisis Dampak Kependudukan	14
18.	Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana	14
19.	Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	14
20.	Direktur Bina Kesehatan Reproduksi	14
21.	Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus	14
22.	Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak	14
23.	Direktur Bina Ketahanan Remaja	14
24.	Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	14
25.	Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	14
26.	Direktur Teknologi Informasi dan Data	14
27.	Direktur Advokasi dan Hubungan Antarlembaga	14
28.	Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	14
29.	Direktur Pelaporan dan Statistik	14
30.	Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan	14
31.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana	14
32.	Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan KB	14
33.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	14
34.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS	14
35.	Inspektur Wilayah I	14
36.	Inspektur Wilayah II	14
37.	Inspektur Wilayah III	14

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
38.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol	11
39.	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama	11
40.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	9
41.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol	9
42.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	9
43.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	9
44.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	9
45.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	9
46.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	9
47.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	9

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Eka Sulistia Ediningsih, S.H.
Nip. 19851012 198601 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Auditor Utama	11
2.	Auditor Madya	11
3.	Auditor Muda	9
4.	Auditor Pertama	8
5.	Auditor Penyelia	8
6.	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
7.	Auditor Pelaksana	6
8.	Widyaiswara Utama	11
9.	Widyaiswara Madya	11
10.	Widyaiswara Muda	9
11.	Widyaiswara Pertama	8
12.	Peneliti Utama	11
13.	Peneliti Madya	11
14.	Peneliti Muda	9
15.	Peneliti Pertama	8
16.	Pustakawan Madya	11

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
17.	Pustakawan Muda	9
18.	Pustakawan Pertama	8
19.	Pustakawan Penyelia	8
20.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
21.	Pustakawan Pelaksana	6
22.	Arsiparis Madya	11
23.	Arsiparis Muda	9
24.	Arsiparis Pertama	8
25.	Arsiparis Penyelia	8
26.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
27.	Arsiparis Pelaksana	6
28.	Pranata Komputer Madya	11
29.	Pranata Komputer Muda	9
30.	Pranata Komputer Pertama	8
31.	Pranata Komputer Penyelia	8
32.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
33.	Pranata Komputer Pelaksana	6
34.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
35.	Analisis Kepegawaian Madya	11
36.	Analisis Kepegawaian Muda	9
37.	Analisis Kepegawaian Pertama	8
38.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
39.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
40.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
41.	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11
42.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9
43.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
44.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
45.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
46.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
47.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	5
48.	Statistisi Madya	11
49.	Statistisi Muda	9
50.	Statistisi Pertama	8

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
51.	Statistisi Penyelia	8
52.	Statistisi Pelaksana Lanjutan	7
53.	Statistisi Pelaksana	6
54.	Perencana Pertama	8
55.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8
56.	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama	13
57.	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya	11
58.	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	9
59.	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	8
60.	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil Penyelia	8
61.	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
62.	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil Pelaksana	6
63.	Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula	5

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Eka Sulistia Ediningsih, S.H.
Nip. 19651012 198601 2 001